

Katalog : 3205005.3308

KEMISKINAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK KABUPATEN MAGELANG

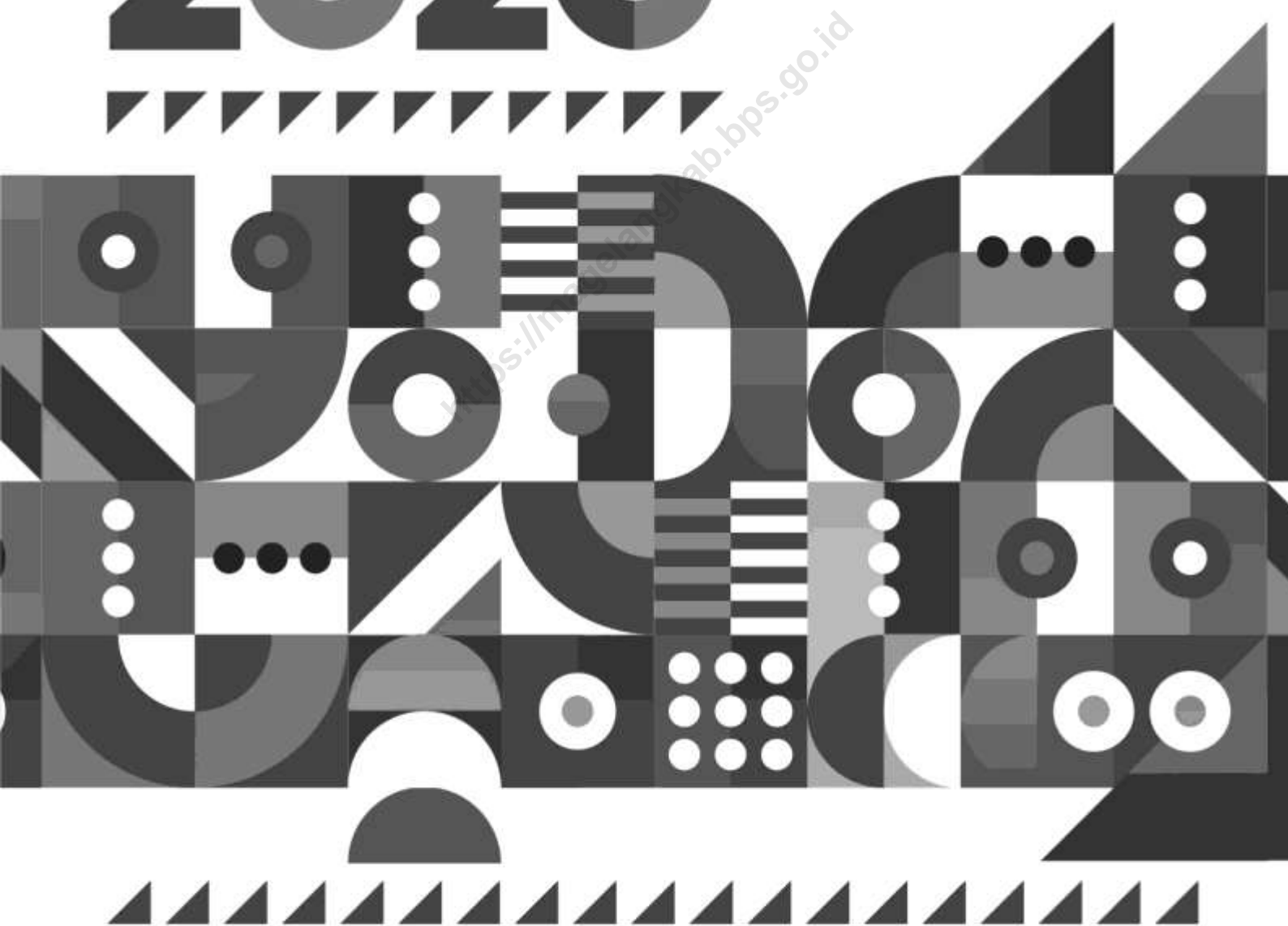
2020



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

KEMISKINAN DAN POLA KONSUMSI PENDUDUK KABUPATEN MAGELANG

2020



Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2020

ISSN : 2776-7116
No Publikasi : 33080.2109
Katalog : 3205005.3308

Ukuran Buku : 21 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 54 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Desain Kover oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pencetak:

TM Percetakan

Sumber Ilustrasi:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang mendapat perhatian lebih dari pemerintah dan masyarakat, baik secara nasional maupun regional. Setiap tahun perkembangan penduduk miskin dan komitmen pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan menjadi pokok bahasan dalam evaluasi dan perencanaan pembangunan. Untuk kegiatan tersebut, aspek penting yang dibutuhkan untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan berkesinambungan.

Badan Pusat Statistik setiap tahunnya berusaha menerbitkan publikasi data kemiskinan dan pola konsumsi penduduk menurut jenis konsumsinya untuk memberi gambaran tentang tingkat kemiskinan makro dan pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang. Penerbitan publikasi ini guna memenuhi sebagian kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat luas akan data dan informasi yang semakin beragam.

Publikasi Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2020 tidak hanya memuat data tahun 2020 tetapi juga dalam beberapa tabel disajikan series data beberapa tahun terakhir. Data yang disajikan dalam publikasi ini bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan setiap tahun pada bulan Maret.

Diharapkan publikasi ini dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Semoga publikasi ini bermanfaat

Kota Mungkid, Mei 2021
Kepala Badan Pusat statistik
Kabupaten Magelang



TOTO DESANTO, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
1 Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan	4
1.3 Sistematika Penyajian	4
2 Metodologi	7
2.1 Sumber Data	7
2.2 Konsep dan Definisi Secara Umum.....	7
2.3 Konsep dan Definisi Kemiskinan.....	8
2.4 Penyebab Kemiskinan	9
2.5 Pengukuran Kemiskinan.....	10
2.5.1 Penghitungan Garis Kemiskinan (GK).....	11
2.5.2 Indikator Kemiskinan Konsumsi	15
2.6 Desain Pengukuran	16
2.7 Kalori	18
3 Analisis Kemiskinan	19
3.1 Kondisi Kemiskinan	19
3.1.1 Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2011-2020.....	19
3.1.2 Garis Kemiskinan (GK) Tahun 2011-2020.....	21
3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2011-2020.....	23
3.2 Karakteristik Penduduk Miskin.....	26
3.2.1 Pendidikan	26
3.2.2 Ketenagakerjaan	30

3.2.3	Fasilitas Perumahan.....	32
3.3	Program Penanggulangan Kemiskinan	34
4	Pola Konsumsi Penduduk	41
4.1	Rata-rata Pengeluaran Penduduk	41
4.2	Pola Konsumsi Penduduk.....	42
4.2.1	Pola Konsumsi Makanan	44
4.2.2	Pola Konsumsi Non Makanan.....	45
4.3	Pola Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pengeluaran.....	47
4.4	Pola Konsumsi Kalori Penduduk.....	49
4.5	Pola Konsumsi Protein Penduduk.....	51
5	Penutup	53

<https://magelangkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1.1. Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020	21
Tabel 3.1.2. Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020.....	22
Tabel 3.1.3. Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020.....	24
Tabel 3.3.1. Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin, Rata-rata Banyaknya Raskin yang Diterima dan Rata-rata Harga Raskin Perkg Tahun 2016-2018	34
Tabel 3.3.2. Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima BPNT dan Rata-rata bantuan yang diterima, Tahun 2019-2020.....	35
Tabel 3.3.3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Tahun 2018-2020	37
Tabel 3.3.4. Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kredit Usaha yang Diterima Setahun Terakhir Tahun 2018-2020	38
Tabel 4.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2016-2020	42
Tabel 4.2. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan menurut Kelompok Komoditas (Rp.) Tahun 2020	44
Tabel 4.3. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah) Tahun 2020.....	49
Tabel 4.4. Rata-rata Konsumsi Kalori Per Kapita Per Hari Menurut Kelompok Pengeluaran Penduduk (Kkal), Tahun 2020	50
Tabel 4.5. Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Per Hari Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Gram), Tahun 2020	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah Tahun 2011-2020 20
Gambar 3.1.2.	Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2020 23
Gambar 3.1.3.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Magelang Tahun 2011-2020..... 25
Gambar 3.2.1.1	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2018-2020 27
Gambar 3.2.1.2.	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Umur 15 – 24 Tahun dan 15 – 55 Tahun Tahun 2018-2020..... 29
Gambar 3.2.1.3.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Umur 7-15 Tahun 2018-2020..... 30
Gambar 3.2.2.1.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke atas menurut Sektor Pekerjaan Tahun 2018-2020..... 31
Gambar 3.2.2.2.	Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan Tahun 2018-2020..... 32
Gambar 3.2.3	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Layak Konsumsi dan yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Tahun 2018-2020..... 33
Gambar 3.3.1.	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2018-2020..... 39
Gambar 4.1.	Komposisi Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, Tahun 2018-2020..... 43
Gambar 4.2.1.	Pola Konsumsi Makanan Menurut Pengeluaran Tahun 2020 45
Gambar 4.2.2.	Pola Konsumsi Non Makanan Menurut Pengeluaran Tahun 2020..... 46
Gambar 4.3.	Komposisi Pengeluaran Makanan dan Non Makanan tiap Kelompok Pengeluaran, Tahun 2020..... 48



Kemiskinan Kabupaten Magelang

2020

**Kemiskinan di
Kabupaten Magelang
tahun 2020
mengalami peningkatan
dibandingkan
tahun 2019**



Tingkat kemiskinan
penduduk Kabupaten
Magelang

11,27

%

setara dengan

146,34

ribu jiwa

meningkat

8,89

ribu jiwa

dibandingkan
tahun 2019

Sejak tahun 2015 garis kemiskinan terus mengalami kenaikan

	2015	2016	2017	2018	2019
GARIS KEMISKINAN (Rp/KAPITA/BULAN)	271.800	281.237	296.327	325.921	342.430
INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P ₁)	1,84	1,67	1,55	0,98	1,23
INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P ₂)	0,44	0,31	0,34	0,17	0,20

Garis Kemiskinan adalah suatu garis batas besarnya pengeluaran yang mampu memenuhi kecukupan kebutuhan minimum makanan (2.100 kkal per kapita per hari) dan kebutuhan minimum non makanan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) merupakan indeks yang menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Penurunan P₁ menunjukkan adanya perbaikan rata-rata pada standar hidup penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) digunakan untuk melihat tingkat keparahan kemiskinan. Penurunan P₂ menunjukkan berkurangnya ketimpangan kemiskinan



Sumber : BPS-Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik harus merupakan data kemiskinan yang dapat dipercaya, sehingga bisa digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, bisa digunakan untuk membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu angka kemiskinan baru dihitung secara nasional. Kemudian mulai Tahun 1990, informasi mengenai penduduk miskin mulai disajikan sampai tingkat provinsi meskipun beberapa provinsi masih digabung. Baru pada Tahun 2002, BPS menyajikan data dan informasi kemiskinan sampai tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan data Susenas. Pada awalnya data kemiskinan dihitung 3 tahun sekali sesuai dengan pelaksanaan Susenas Modul konsumsi yang dilakukan setiap 3 tahun, mulai tahun 2011 sampai 2014 dilakukan penghitungan kemiskinan setiap tahun dengan pelaksanaan Susenas Modul Konsumsi triwulanan. Sejak tahun 2015 penghitungan angka kemiskinan didasarkan pada hasil Susenas Konsumsi Pengeluaran yang dilakukan setiap bulan Maret.

Arah dan tujuan pembangunan nasional mensyaratkan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan

rakyat, dan hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh rakyat berdasarkan dengan nilai kontribusi masing-masing. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan, namun harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan tersedianya data dan informasi yang dapat memberi gambaran tentang kondisi kesejahteraan dan pola konsumsi penduduk-

Berkaitan dengan hal-hal diatas dan untuk menjawab kebutuhan data perlu disusun publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2020” yang memuat data dan informasi tentang kondisi kemiskinan dan pola konsumsi penduduk Kabupaten Magelang.

1.2. Tujuan

Secara spesifik penerbitan publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2020” ini bertujuan memberikan data dan informasi tentang:

- i. perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Magelang tahun 2011-2020
- ii. perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2020
- iii. perkembangan Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Magelang Tahun 2011-2020
- iv. karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Magelang Tahun 2018-2020
- v. program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan Tahun 2018-2020
- vi. gambaran secara umum kondisi dan pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Magelang pada tahun 2020.
- vii. gambaran dan bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan berkaitan dengan kemiskinan dan pola konsumsi penduduknya.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi ini disajikan secara sistematis dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang berisi latar belakang, tujuan, lingkup pembahasan, sumber data dan sistematika penyajian.

Bab dua berisi metodologi yang berisi sumber data, konsep dan definisi, penghitungan kemiskinan dan teori yang dipakai dalam analisis kemiskinan.

Bab tiga berisi tentang analisis kemiskinan yang berisi berbagai ukuran kemiskinan, karakteristik penduduk miskin, dan program bantuan pengentasan kemiskinan.

Bab empat berisi analisis pola konsumsi penduduk di Kabupaten Magelang.

Bab lima menyajikan masalah saran kebijakan yang berisi pentingnya data kemiskinan, strategi pengurangan kemiskinan dan ketimpangan dan pengaruh pola konsumsi penduduk.

<https://magelangkab.bps.go.id>

BAB 2

METODOLOGI

2.1. Sumber Data

Angka Kemiskinan dan Pola Konsumsi penduduk Tahun 2020 di Kabupaten Magelang dihitung berdasarkan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2020. Pengumpulan data rumah tangga diperoleh dari hasil wawancara langsung antara pencacah dan responden yang mewakili rumah tangga bersangkutan

2.2. Konsep dan Definisi Secara Umum

Konsep dan definisi yang digunakan dalam penulisan publikasi ini sesuai dengan konsep dan definisi yang digunakan pada Susenas 2019.

Rumah Tangga

Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta kebutuhan sehari-hari diurus bersama menjadi satu.

Anggota rumah tangga/ Penduduk

Anggota Rumah Tangga (ART) / penduduk adalah orang yang biasanya tinggal dalam satu rumah tangga, baik yang berada didalam rumah tangga saat pencacahan maupun yang sementara sedang tidak ada. Orang yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan untuk menetap ditempat lain/pindah tidak termasuk ART. Dan orang yang telah tinggal di rumah tangga enam bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan tapi bertujuan untuk menetap dianggap sebagai ART.

Pengeluaran

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga untuk konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi makanan dan konsumsi non makanan (perumahan, aneka

barang dan jasa, pendidikan, kesehatan, transportasi, pakaian, barang tahan lama, pajak dan asuransi, dan keperluan pesta dan upacara). Konsumsi yang dimasukkan disini tidak memperhatikan asal barang atau jasa, jadi baik dari pembelian, pemberian, dan produksi sendiri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga semua dimasukkan dalam pencacahan. Sedangkan pengeluaran rumah tangga yang digunakan rumah tangga lain atau diberikan kepada pihak lain tidak dimasukkan dalam pencacahan konsumsi rumah tangga.

Pendapatan

Pendapatan adalah penerimaan berupa uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan. Dalam kenyataan dilapangan, informasi tentang pendapatan tidak seperti yang diharapkan karena banyak responden cenderung menyembunyikan informasi pendapatan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, data pendapatan diperkirakan dari data pengeluaran dengan asumsi bahwa pengeluaran masyarakat merupakan gambaran dari pendapatan mereka.

2.3. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Untuk mewujudkan hak-hak dasar seseorang atau sekelompok orang miskin Bappenas menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain;

1. Pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat

dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi.

2. Pendekatan pendapatan (*income approach*), kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.
3. Pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*), menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan.
4. Pendekatan obyektif and subyektif, pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan, sedangkan pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Karenanya, kemiskinan hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi–dimensi lain itu diperhitungkan.

2.4. Penyebab Kemiskinan

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan. Menurut Bank Dunia (2003), penyebab dasar kemiskinan adalah:

1. kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
2. terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;

3. kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
4. adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
5. adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
6. rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
7. budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
8. tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
9. pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

2.5. Pengukuran Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, digunakan pendekatan kebutuhan dasar atau dengan kata lain, konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Bank Dunia menggunakan dua kriteria dalam menentukan garis kemiskinan:

1. Menggunakan garis kemiskinan nasional yang didasarkan pada pola konsumsi 2.100 kilokalori per hari.
2. Garis kemiskinan internasional berdasarkan PPP (*purchasing power parity*) 1,25 dolar AS dan 2 dolar AS, sehingga dapat digunakan sebagai standar internasional yang bisa diterapkan di seluruh negara. Nilai tukar PPP 1 dolar AS mempunyai pengertian berapa rupiah yang diperlukan untuk membeli barang dan jasa, yang bisa dibeli dengan satu dolar atau dua dolar di Amerika Serikat. Nilai tukar ini dihitung secara berkala dari data harga dan kuantitas konsumsi sejumlah barang dan jasa untuk setiap negara.

Badan Pusat Statistik mengukur kemiskinan makro menggunakan pendekatan pengeluaran konsumsi penduduk. Konsep yang digunakan adalah dengan konsep moneter bahwa kemiskinan sebagai kekurangan penghasilan dalam pendekatan pengeluaran rumah tangga (Jousairi Hasbullah). Metode yang dipakai BPS ini juga dipakai 50 persen negara berkembang dari 84 negara berkembang menurut inventarisasi dari *United Nation Statistic Division*.

2.5.1 Penghitungan Garis Kemiskinan (GK)

BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran, dimana kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kor dan Konsumsi. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Rumus Penghitungan :

$$GK = GKM + GKNM$$

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makan

Teknik penghitungan GKM:

1. Tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi (*reference populaion*) yaitu 20 persen penduduk yang berada diatas Garis Kemiskinan Sementara (GKS). Kelompok referensi ini didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitung

berdasar GK periode sebelumnya yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

2. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata Kalori dari ke-52 komoditi tersebut.
3. Formula dasar dalam menghitung Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah :

$$GKM_j = \sum_{k=1}^{52} P_{jk} \cdot Q_{jk} = \sum_{k=1}^{52} V_{jk}$$

Dimana :

GKM_j = Garis Kemiskinan Makanan Daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100kilokalori).

P_{jk} = Harga komoditi k di daerah j.

Q_{jk} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j.

V_{jk} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j.

j = Daerah (perkotaan atau pedesaan)

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata Kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga :

$$\overline{HK}_j = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jk}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jk}}$$

dimana :

K_{jk} = Kalori dari komoditi k di daerah j

\overline{HK}_j = Harga rata-rata Kalori di daerah j

$$F_j = \overline{HK}_j \times 2100$$

dimana :

F_j = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari atau GKM.

J = daerah (perkotaan/perdesaan).

4. Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa non makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada periode sebelum tahun 1993 terdiri dari 14 komoditi di perkotaan dan 12 komoditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri dari 27 sub kelompok (51 jenis komoditi) di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan.

Nilai kebutuhan minimum perkomoditi /sub-kelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKP), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci dibanding data Susenas Modul Konsumsi.

Nilai kebutuhan minimum non makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$NF_p = \sum_{i=1}^n r_i \times V_i$$

dimana:

NF_p = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non makanan daerah p (GKNM_p).

- V_i = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non-makanan daerah p (dari Susenas modul konsumsi).
- r_i = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non-makanan menurut daerah (hasil SPPKD2004).
- I = Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p.
- P = Daerah (perkotaan atau pedesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \cdot 100$$

- $\%PM_p$ = % Penduduk miskin di provinsi p.
- PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.
- P_p = Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

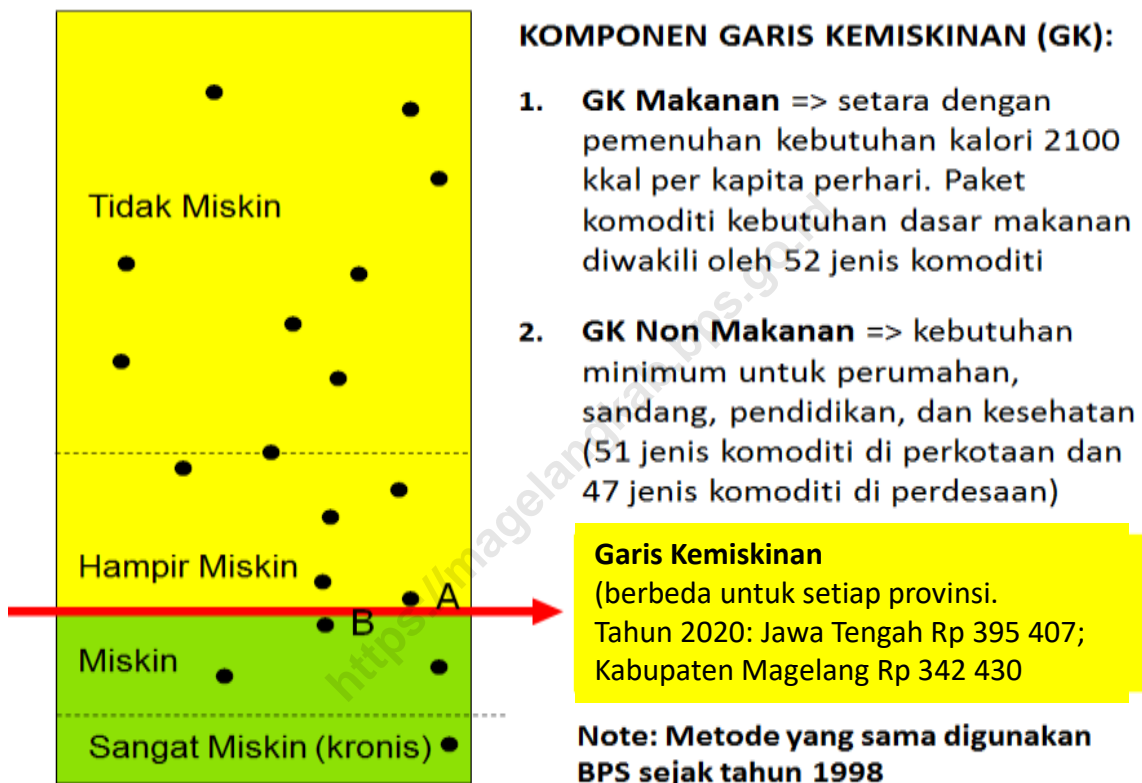
$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

- PM_I = Penduduk miskin Indonesia.
- PM_p = Penduduk miskin provinsi p.
- N = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PM_1 = \frac{PM_1}{P_1}$$

- $\%PM_1$ = Persentase penduduk miskin (secara nasional).
 PM_p = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).
 P_1 = Jumlah penduduk Indonesia.



2.5.2 Indikator Kemiskinan Konsumsi

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

1. *Head Count Index (HCI- P_0)*, yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index- P_1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran

penduduk dari garis kemiskinan.

3. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha},$$

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $a=0$, diperoleh *Head Count Index (P₀)*, jika $a=1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) dan jika $a=2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index-P₂*).

2.6. Desain Pengukuran

Pengukuran tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan biasanya didekati dengan menggunakan data pengeluaran, karena data pendapatan masyarakat tersebut ternyata masih sulit diperoleh. Dalam hal ini analisis tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumahtangga dari hasil Susenas. Bagaimana pun juga, distribusi pengeluaran tidak akan sama dengan distribusi pendapatan. Namun cara ini dianggap sebagai pendekatan yang rasional untuk melihat trend dari distribusi pendapatan, walaupun harus diinterpretasikan secara hati-hati.

Melalui kegiatan Susenas, nilai pendapatan masyarakat Kabupaten Magelang diestimasi dari data konsumsi dengan pendekatan rata-rata pengeluaran rumahtangga perbulan. Data yang dikumpulkan adalah data konsumsi yang mencakup seluruh

kebutuhan hidup masyarakat. Mengingat jumlah komoditi yang dikonsumsi oleh masyarakat sangat banyak dan beragam, maka dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu konsumsi kelompok makanan dan konsumsi kelompok bukan makanan.

A. Konsumsi makanan, meliputi :

1. Konsumsi padi-padian (beras, jagung terigu, dll)
2. Konsumsi umbi-umbian (ketela, kentang, sagu, dll)
3. Konsumsi ikan/udang/cumi/kerang (segar dan diawetkan)
4. Konsumsi daging (sapi, kerbau, kambing, ayam dll)
5. Konsumsi telur dan susu
6. Konsumsi sayur-sayuran (bayam, wortel, cabe, dll)
7. Konsumsi kacang-kacangan
8. Konsumsi buah-buahan
9. Konsumsi minyak dan lemak
10. Konsumsi bahan minuman (gula, teh, kopi, coklat, sirup, dll)
11. Konsumsi bumbu-bumbuan (garam, kemiri, merica, terasi, kecap, dll)
12. Konsumsi lainnya (mie instan/basah, bihun, makaroni, kerupuk dll)
13. Konsumsi makanan dan minuman jadi (roti, biskuit, bakso, nasi rames, minuman beralkohol dan non alkohol)
14. Konsumsi tembakau dan sirih.

B. Konsumsi non makanan, meliputi :

1. Perumahan dan fasilitas rumahtangga (sewa/perkiraan sewa, pemeliharaan/perbaikan ringan, rekening listrik/air/telepon, gas, minyak tanah, pulsa dll)
2. Aneka barang dan jasa (sabun/kosmetik, biaya kesehatan, pendidikan, transport, jasa lainnya).
3. Pakaian, alas kaki dan tutup kepala.
4. Barang tahan lama (alat rumahtangga, elektronik dll)
5. Pajak, pungutan dan asuransi.
6. Keperluan pesta dan upacara, tidak termasuk makanan.

Untuk konsumsi makanan ditanyakan selama seminggu terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Sedang untuk pengeluaran bukan makanan ditanyakan kondisi sebulan yang lalu dan satu tahun terakhir, baik yang berasal dari pembelian, produksi sendiri maupun dari pemberian. Desain kuesioner secara detail dibuat dengan harapan responden mampu mengingat nilai konsumsi yang dikeluarkannya.

2.7. Kalori

Kalori adalah satuan ukuran untuk energi. Satu kalori secara resmi didefinisikan sebagai jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 cm³ air (atau 1 gram air) sebesar satu derajat Celcius. Untuk mengukur jumlah energi dalam makanan, ahli gizi umumnya menggunakan kilokalori (setara dengan 1000 kalori), dan label pengukuran mencantumkan sebagai “kkal” atau sebagai “Kalori” dengan “K” besar. Satu kkal setara dengan sekitar 4,184 kalori

BAB 3

ANALISIS KEMISKINAN

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Perubahan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat melalui analisis tren tingkat kemiskinan antara kondisi tahun 2011 sampai dengan tahun 2020. Analisis ini mencakup garis kemiskinan, jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan, serta profil rumah tangga miskin.

3.1. Kondisi Kemiskinan

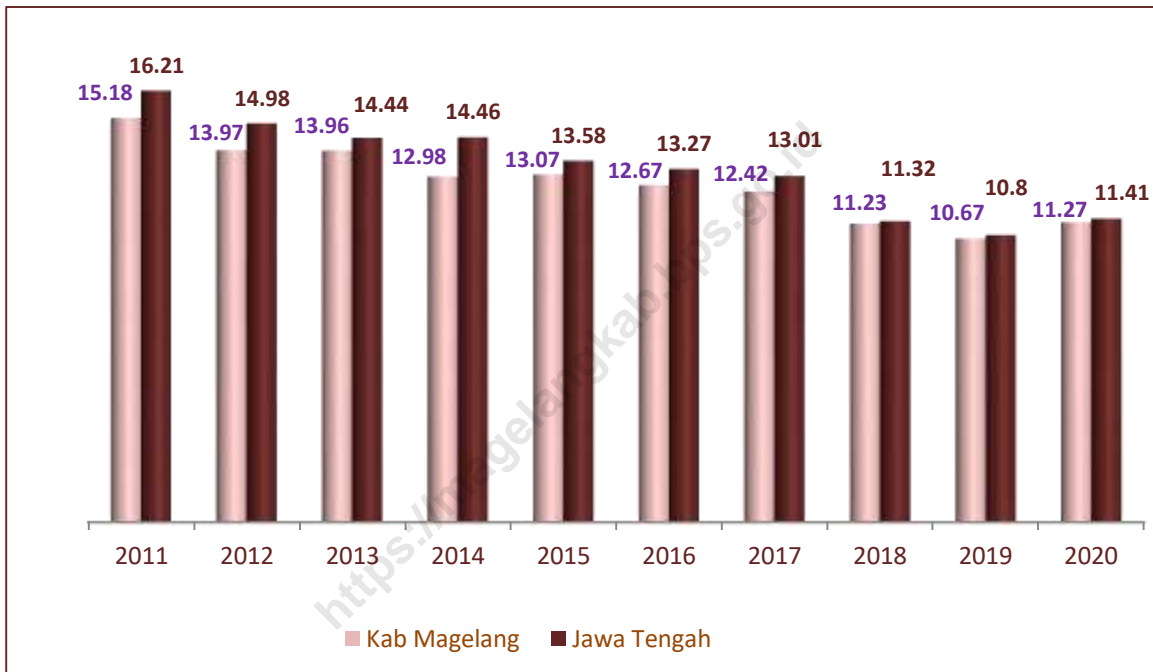
3.1.1. Kemiskinan Kabupaten Magelang Tahun 2011-2020

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode tahun 2011-2020 ditunjukkan pada Gambar 3.3.1 dan Tabel 3.1.1. Secara umum, pada periode tersebut, tingkat kemiskinan di Kabupaten Magelang cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya, perkecualian terjadi kenaikan tingkat kemiskinan pada tahun 2014-2015 dan tahun 2019-2020. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang sebesar 146,34 ribu jiwa (11,27 persen), naik dibanding tahun 2019 yang sebesar 137,45 ribu jiwa (10,67 persen). Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan penduduk miskin sebesar 0,60 persen poin atau sebanyak 8,89 ribu jiwa. Salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2020 ini adalah adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.

Selama periode 2011-2020, persentase penduduk miskin terendah di Kabupaten Magelang terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,67 persen, sedangkan persentase

penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 15,18 persen. Pada Tahun 2011 penduduk miskin Kabupaten Magelang sebesar 15,18 persen atau sebanyak 179,6 ribu jiwa, turun menjadi 11,27 persen di tahun 2020 atau sebanyak 146,34 ribu jiwa. Dalam rentang waktu 10 tahun, pemerintah berhasil mengentaskan 33,26 ribu penduduk miskin, dengan nilai yang berfluktuasi di tiap tahunnya.

Gambar 3.1.1.
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Magelang dan Jawa Tengah
Tahun 2011 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pada level provinsi, persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah selama 2011—2020 menunjukkan penurunan, perkecualian pada tahun 2020. Pada tahun 2011, persentase penduduk miskin mencapai 16,21 persen, kemudian turun menjadi 11,41 persen pada tahun 2020. Selama periode 2011-2020, tingkat kemiskinan Kabupaten Magelang selalu lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.1.1
Persentase Penduduk Miskin dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011 – 2020

No	Tahun	Persentase Penduduk Miskin		Jumlah Penduduk Miskin (dalam ribuan)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2011	15,18	16,21	179,60	5 256,0
2	2012	13,97	14,98	169,39	4 952,1
3	2013	13,96	14,44	171,02	4 811,3
4	2014	12,98	14,46	160,48	4 836,4
5	2015	13,07	13,58	162,38	4 577,0
6	2016	12,67	13,27	158,86	4 506,89
7	2017	12,42	13,01	157,15	4 450,72
8	2018	11,23	11,32	143,44	3 897,20
9	2019	10,67	10,80	137,45	3 743,23
10	2020	11,27	11,41	146,34	3 980,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

3.1.2. Garis Kemiskinan Tahun 2011-2020

Garis kemiskinan adalah garis yang menunjukkan nilai minimal dari suatu rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak masuk dalam kelompok rumah tangga miskin. Seseorang dalam suatu rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan akan masuk dalam kelompok penduduk miskin. Garis kemiskinan di Kabupaten Magelang pada periode 2011 - 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp. 138 000,- perkapita perbulan yaitu dari Rp. 204 430,- pada tahun 2011 menjadi Rp. 342 430,- pada tahun 2020.

Pada tahun 2011 di Kabupaten Magelang seseorang harus mampu mengeluarkan minimal Rp. 204 430,- sebulan untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin. Jadi apabila dalam suatu rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga maka setiap

bulannya rumah tangga tersebut harus mengeluarkan minimum Rp. 817 720,- untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin. Namun sepuluh tahun kemudian (2020), kenaikan harga barang-barang konsumsi telah menaikkan garis kemiskinan menjadi Rp. 342 430,- atau jika dalam rumah tangga terdiri dari 4 anggota rumah tangga maka untuk tidak tergolong dalam kelompok penduduk miskin rumah tangga tersebut harus mengeluarkan minimum Rp. 1 369 720,- setiap bulannya.

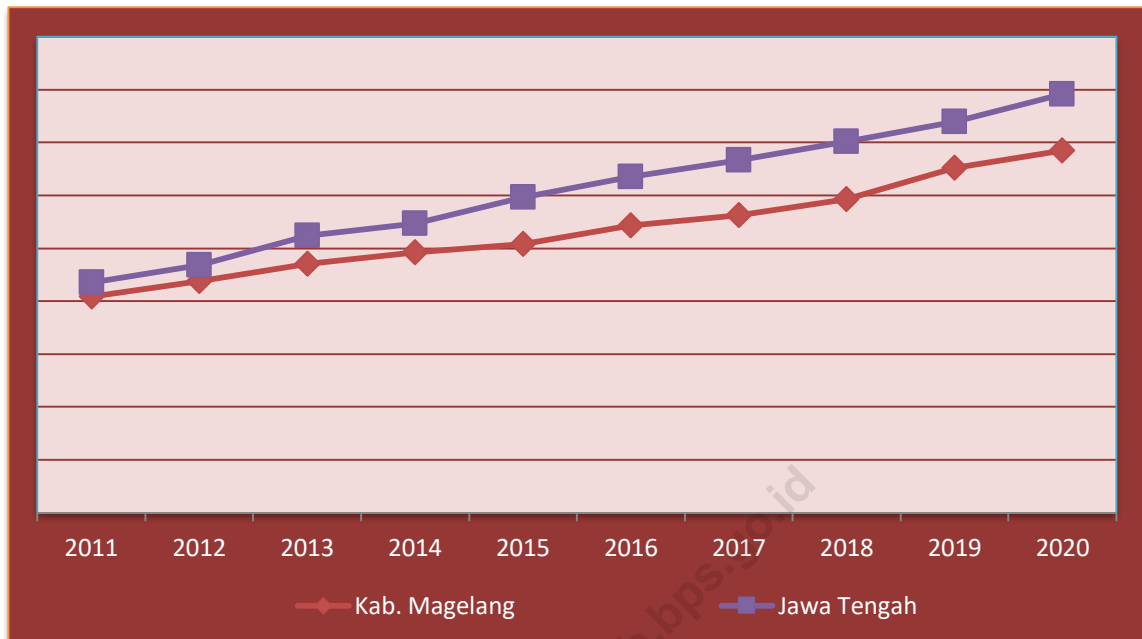
Garis kemiskinan Tahun 2020 sebesar Rp. 342 430,- atau naik sebesar 15,47 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 325 921,- di tahun 2019. Kenaikan garis kemiskinan ini merupakan akibat dari kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk.

Tabel 3.1.2.
Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011 – 2020

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bulan)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2011	204 430	217 440
2	2012	218 950	233 769
3	2013	235 430	261 881
4	2014	246 292	273 056
5	2015	253 866	297 851
6	2016	271 800	317 348
7	2017	281 237	333 224
8	2018	296 327	350 875
9	2019	325 921	369 385
10	2020	342 430	395 407

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambar 3.1.2
Garis Kemiskinan Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

3.1.3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan serta Tingkat Keparahan Kemiskinan Tahun 2011-2020

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Indikator *Headcount Index/Head Count Ratio* (P_0) atau dengan melihat persentase penduduk miskin terhadap total penduduk, tidak dapat mengindikasikan seberapa parah/dalam tingkat kemiskinan yang terjadi, mengingat ukuran ini tetap tidak berubah jika seorang yang miskin menjadi lebih miskin.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan indikator kemiskinan yang lain yaitu tingkat kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1) dan tingkat keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2). Tingkat kedalaman kemiskinan menjelaskan rata-rata jarak antara taraf hidup penduduk miskin dengan garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Namun demikian, indeks ini tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan di antara penduduk miskin sehingga dibutuhkan indikator lain guna mengukur hal tersebut yaitu dengan tingkat keparahan kemiskinan. Penurunan pada P_1 mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara standar

hidup penduduk miskin. Hal ini juga berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati garis kemiskinan yang mengindikasikan berkurangnya kedalaman kemiskinan. Sedangkan penurunan pada P2 mengindikasikan berkurangnya ketimpangan kemiskinan atau dengan kata lain distribusi pendapatan diantara penduduk miskin semakin merata.

Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Tabel 3.1.3.
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P₁) serta Tingkat Keparahan Kemiskinan (P₂)
Kabupaten Magelang dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011 – 2020

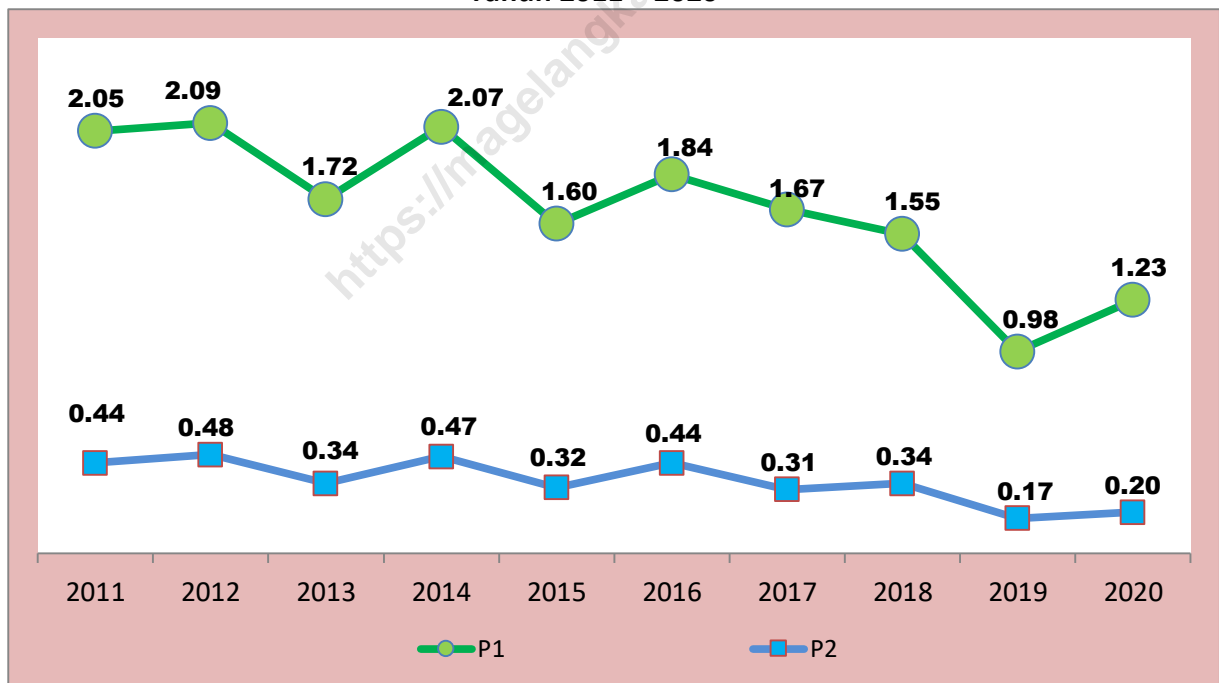
No	Tahun	P ₁ (Kedalaman Penduduk Miskin)		P ₂ (Keparahan Penduduk Miskin)	
		Kabupaten Magelang	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	Jawa Tengah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2011	2,05	2,58	0,44	0,66
2	2012	2,09	2,39	0,48	0,57
3	2013	1,72	2,37	0,34	0,59
4	2014	2,07	2,25	0,47	0,56
5	2015	1,60	2,44	0,32	0,65
6	2016	1,84	2,37	0,44	0,63
7	2017	1,67	2,21	0,31	0,57
8	2018	1,55	1,85	0,34	0,45
9	2019	0,98	1,53	0,17	0,30
10	2020	1,23	1,72	0,20	0,34

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pada periode 2011-2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan menurun. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 2,05 pada tahun 2011 menjadi 1,23 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya

peningkatan pendapatan masyarakat miskin yang ditandai dengan rata-rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan semakin rendah. Dalam 10 tahun terakhir, nilai ini memperlihatkan angka yang berfluktuasi dengan nilai yang naik turun tidak berpola. Hal positif yang bisa kita lihat adalah nilai kedalaman kemiskinan berkisar di angka 0,98 sampai 2,09. Nilai tersebut menunjukkan kondisi yang lebih stabil dan semakin mudah mengentaskan kemiskinan karena rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinannya. Akan tetapi di satu tahun terakhir yaitu 2019 – 2020 terjadi kenaikan dari kondisi terendah di tahun 0,98 (2019) menjadi 1,23 (2020). Hal ini akibat dengan adanya pandemic covid19, yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sehingga kembali mendekati garis kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 2,09.

Gambar 3.1.3
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Magelang
Tahun 2011 – 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Indeks keparahan kemiskinan kadangkala tidak sejalan dengan nilai indeks kedalaman kemiskinan. Pada saat indeks kedalaman kemiskinan menurun, bisa kita temukan nilai indeks keparahan kemiskinan menunjukkan peningkatan. Hal ini terjadi karena

kenaikan tingkat pengeluaran penduduk tidak terjadi merata di semua rumah tangga sehingga muncul nilai ketimpangan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2011 indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,44 menjadi 0,20 di tahun 2020 atau selama kurun waktu 10 tahun terakhir indeks keparahan kemiskinan turun menjadi setengahnya. Indeks keparahan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 0,48 dan terendah di Tahun 2019 yang sebesar 0,17. Dan di setahun terakhir, tahun 2019 – 2020 juga terdapat kenaikan indeks keparahan kemiskinan meskipun tidak terlalu signifikan yaitu sebesar 0,03. Jika melihat fluktuasi nilai indeks keparahan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir terlihat nilai kesenjangan pendapatan dan pengeluaran diantara penduduk miskin tidak terlalu besar, nilainya tidak pernah berubah secara signifikan hanya dalam range 0,17-0,48.

Indeks keparahan kemiskinan menunjukkan kesenjangan pengeluaran yang terjadi diantara penduduk miskin. Semakin kecil nilai indeks maka kesenjangan pengeluaran penduduk miskin semakin menyempit. Hal ini juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap program pengentasan kemiskinan karena akan mempermudah usaha pengentasan kemiskinan karena kondisi penduduk miskin semakin homogen.

3.2. Karakteristik Penduduk Miskin

3.2.1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran penting dalam program pengentasan kemiskinan. Tingkat pendidikan penduduk sangat berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena tingkat pendidikan berperan dalam pembentukan karakter, pola pikir, kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat, dan tingkat kepercayaan diri penduduk untuk bersaing di dunia kerja. Tidak hanya berguna dalam persaingan dalam mencari pekerjaan namun juga berperan dalam ketangguhan penduduk dalam usaha untuk mencari alternatif penghidupan yang lebih baik. Bagi pemerintah, pembangunan dalam bidang pendidikan juga untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup penduduk, mengurangi ketimpangan pendapatan dan akhirnya mengentaskan masalah kemiskinan.

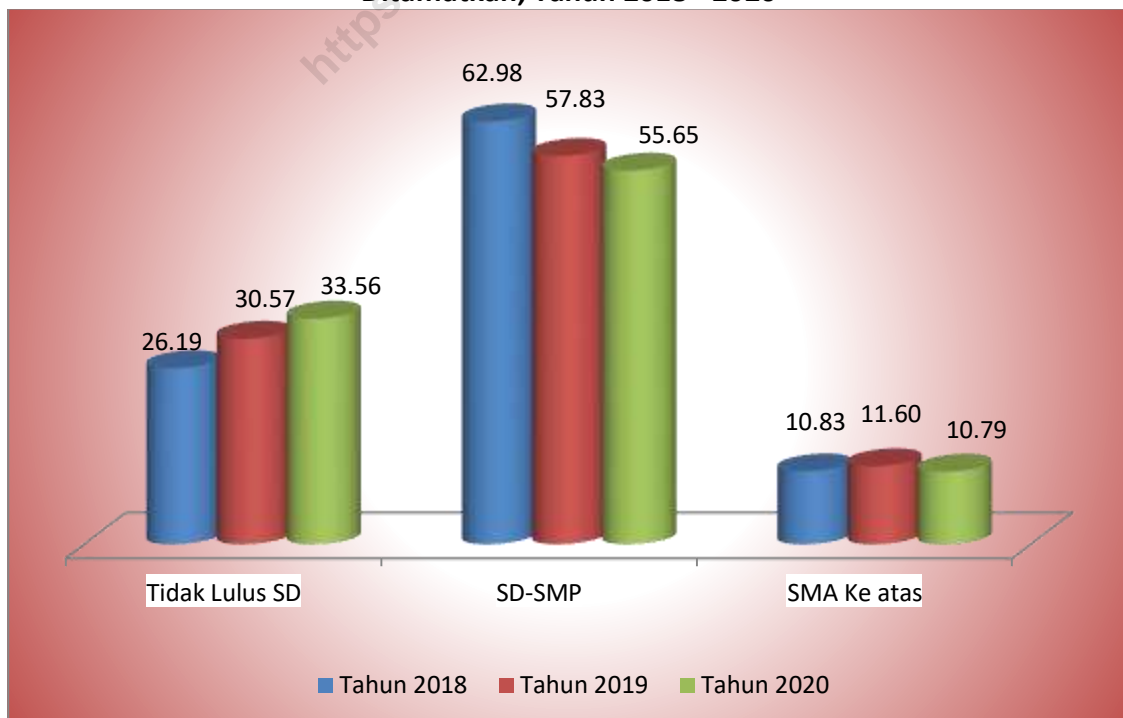
Pada kondisi rumah tangga miskin, pendidikan tentu belum menjadi prioritas karena bagi mereka memenuhi kebutuhan primernya saja masih mengalami kesulitan.

Dengan kondisi ini, kemiskinan akan menjadi lingkaran setan, dimana anak yang lahir dari keluarga miskin akan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah sehingga kedepannya dengan pendidikan yang rendah hanya bisa mendapatkan pekerjaan yang hasilnya tidak tetap dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya.

Dalam masalah pendidikan, pemerintah memang sudah membuat berbagai program untuk mengentaskan masalah pendidikan. Program tersebut diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dengan program tersebut untuk tingkat pendidikan dasar negeri (setingkat SD dan SMP) bisa digratiskan dalam biaya bulanan. Bahkan mulai Tahun 2017 Bantuan Operasional Sekolah sudah bertambah sampai ke jenjang SMA dan di tahun 2020 . Selain itu ada program Indonesia Pintar maupun Bantuan Siswa Miskin serta Program Keluarga Harapan. Diharapkan dengan berbagai program ini dapat digunakan sebagai solusi untuk peningkatan pendidikan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk melihat gambaran pendidikan antara lain tingkat pendidikan yang ditamatkan, Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah.

Gambar 3.2 1.1.
Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Keatas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2018 - 2020



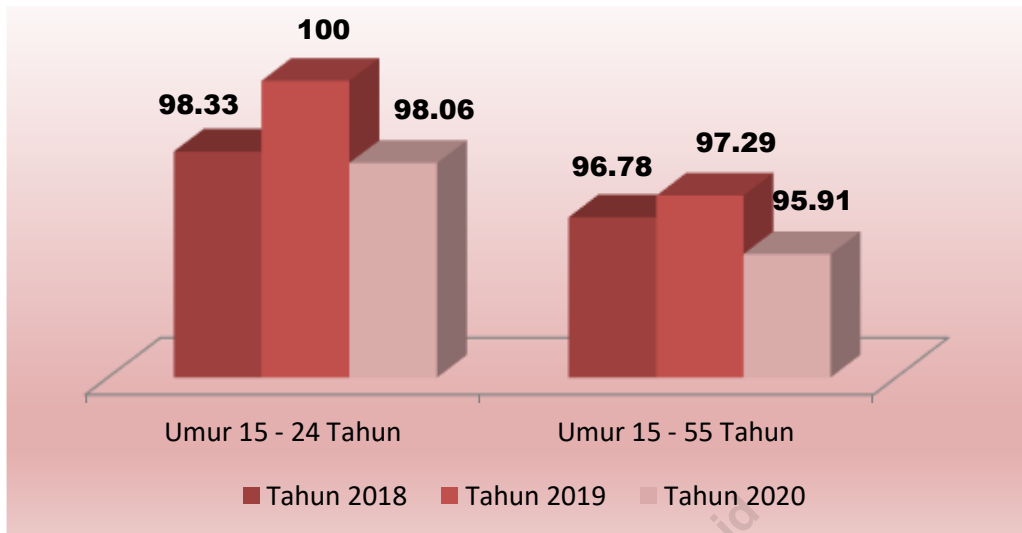
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambaran tingkat pendidikan penduduk miskin umur 15 tahun ke atas berdasarkan hasil Susenas Maret Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020 dapat dilihat bahwa lebih dari separuh penduduk miskin berpendidikan SD-SMP, urutan kedua untuk kelompok penduduk miskin yang tidak berpendidikan dan yang paling sedikit adalah kelompok pendidikan SMA keatas. Selama periode 2018-2020, sebagian besar penduduk miskin usia 15 tahun ke atas cenderung tamat SD dan SMP berturut-turut sebanyak 62,98 persen, 57,83 persen, dan 55,65 persen. Sedangkan untuk penduduk miskin dengan pendidikan lulus SMA ke atas sebesar 10,83 persen di tahun 2018, 11,60 persen di tahun 2019, dan 10,79 di tahun 2020.

Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan kemampuan penduduk untuk membaca dan menulis minimal dalam satu kalimat sederhana. Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Membaca dan menulis disini tidak harus huruf latin, namun juga bisa huruf hijaiyah, atau huruf lainnya misal aksara jawa atau huruf kanji. AMH penduduk miskin untuk kelompok usia pendidikan yaitu di umur 15 – 24 tahun dari hasil Susenas 2018 sebesar 98,33 persen, 100 persen di tahun 2019, dan 98,06 di tahun 2020. Penurunan yang terjadi selama periode 2019-2020 menunjukkan sebenarnya di masyarakat masih ada penduduk miskin yang belum bisa membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya karena beberapa sebab. Untuk kelompok umur 15 – 55 tahun, selama periode 2018-2020, AMH Kabupaten Magelang berturut-turut sebesar 96,78 persen, 97,29 persen, dan 95,91 persen

Kemampuan membaca dan menulis penting bagi kehidupan manusia karena melalui tulisan banyak ilmu dan pengetahuan yang akan diperoleh. Pengetahuan yang tepat dan sesuai akan membuka wawasan sehingga memberi banyak alternatif pilihan dalam hidup yang diharapkan akan memperbaiki cara hidup dan kemampuan bertahan hidup, bahkan mungkin untuk meningkatkan kemampuan secara ekonomi dan melepaskan diri dari jeratan kemiskinan.

Gambar 3.2.1.2.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Miskin Umur 15 – 24 Tahun dan 15 – 55 Tahun, Tahun 2018 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Indikator lain yang digunakan untuk melihat tingkat pendidikan penduduk adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah merupakan proporsi semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Penghitungan ini memasukkan pendidikan non formal yaitu kejar paket A, Paket B dan Paket C. Dari Hasil Susenas, APS penduduk miskin umur 7 – 12 tahun selama kurun waktu tiga tahun terakhir sudah mencapai 100 persen. Angka ini menunjukkan bahwa semua penduduk miskin yang berumur 7 – 12 Tahun masih bersekolah. Sedangkan untuk kelompok umur 13 – 15 tahun, nilai APS selama kurun waktu dua tahun terakhir juga sudah mencapai 100 persen.

Gambar 3.2.1.3.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Miskin Umur 7 – 15 Tahun,
Tahun 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

3.2.2. Ketenagakerjaan

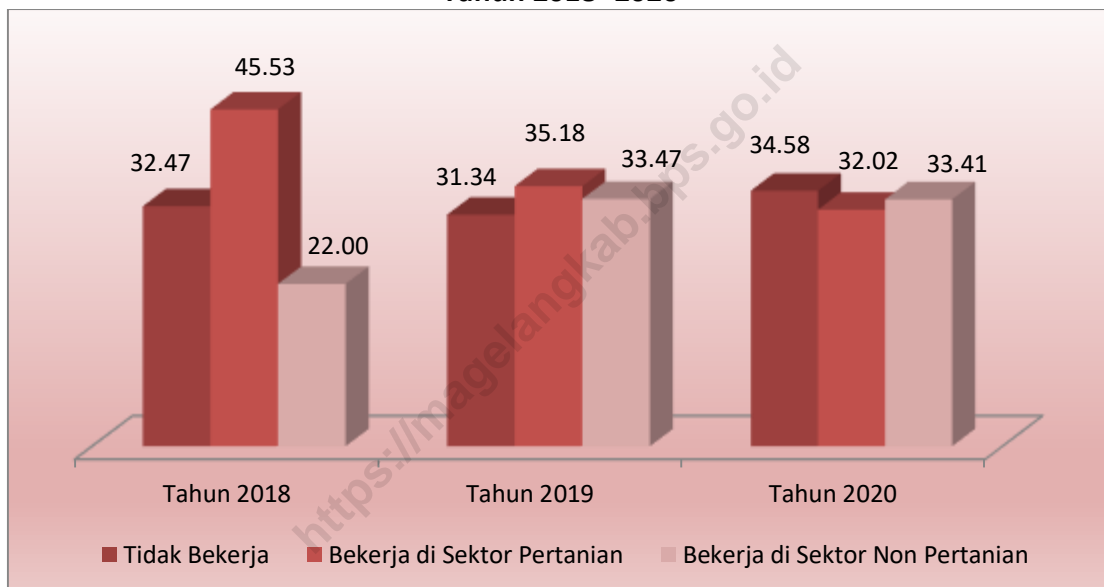
Ketenagakerjaan dalam masalah kemiskinan juga memegang peranan penting. Ketenagakerjaan berkaitan dengan sumber penghasilan rumah tangga yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Penggolongan penduduk miskin dan tidak miskin suatu rumah tangga juga didasarkan pada tingkat kesejahteraan yang ditentukan oleh rata-rata pengeluaran rumah tangga perkapita perbulan. Besarnya pengeluaran rumah tangga tentunya juga dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang diperoleh oleh semua anggotarumah tangga berdasarkan pekerjaan masing-masing.

Masalah ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan penduduk yang bekerja. Bekerja disini adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir. Dari hasil pendataan Susenas, persentase penduduk miskin yang tidak bekerja pada tahun 2018 sebesar 32,47 persen, bekerja di sektor pertanian sebesar 45,53 persen, dan bekerja di sektor non pertanian

sebesar 22,00 persen. Pahun 2019 terjadi penurunan angka penduduk miskin yang menganggur dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi 31,34 persen. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 35,18 persen dan bekerja di sektor non pertanian sebesar 33,47 persen.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak bekerja yaitu sebesar 34.58 persen. Sebanyak 32,02 persen bekerja di sektor pertanian dan 33,41 persen bekerja di sektor non pertanian.

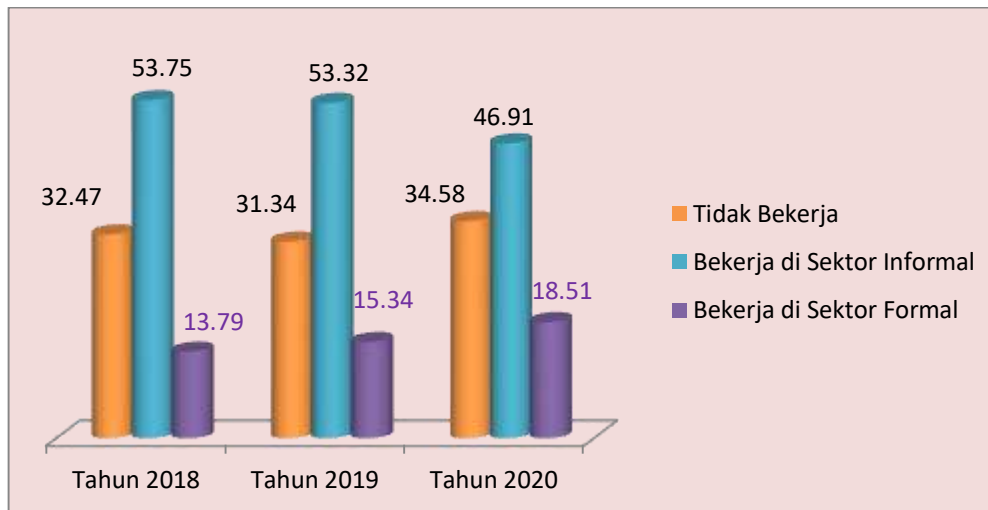
Gambar 3.2.2.1
Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke Atas menurut Sektor Pekerjaan
Tahun 2018- 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Karakteristik penduduk miskin dilihat dari sisi ketenagakerjaan yang lain adalah status pekerjaan, yaitu penduduk yang bekerja di sektor formal dan sektor informal. Bekerja di sektor formal adalah penduduk miskin yang mempunyai status kedudukan dalam pekerjaan utamanya adalah bekerja dibantu buruh tetap/buruh dibayar dan penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Sedangkan bekerja di sektor informal adalah penduduk miskin yang status kedudukan dalam pekerjaannya adalah bekerja sendiri, bekerja dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Gambar 3.2.2.2
Persentase Penduduk Miskin Umur 15 Tahun Ke atas menurut Status Pekerjaan,
Tahun 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Persentase penduduk miskin umur 15 tahun ke atas menurut status pekerjaan di Kabupaten Magelang pada periode tahun 2018-2020 ditunjukkan pada Gambar 3.2.2.2. Dilihat dari grafik diatas, batang yang menonjol dalam tiga tahun pengamatan adalah untuk penduduk yang bekerja di sektor informal. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin cenderung mempunyai pekerjaan yang tidak tetap/pekerja bebas atau pekerjaan yang belum mapan sehingga sangat berpengaruh dalam kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada tahun 2020, penduduk miskin umur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal sebanyak 46,91 persen, bekerja di sektor formal 18,51 persen, dan yang tidak bekerja sebesar 34,58 persen.

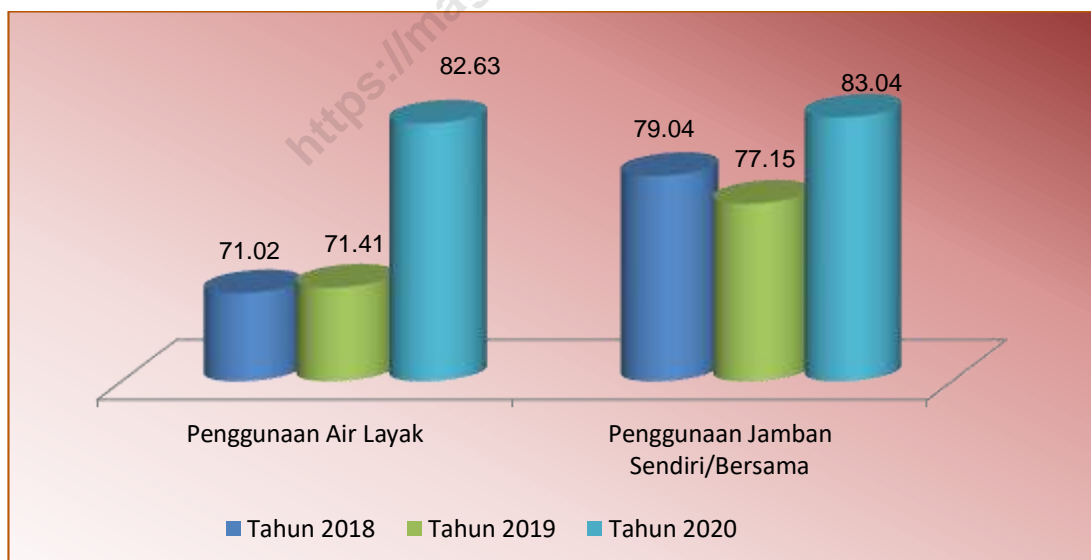
3.2.3 Fasilitas Perumahan

Fasilitas yang dimiliki oleh suatu tempat tinggal mempengaruhi tingkat kenyamanan dan kesehatan penghuninya. Tingkat kesehatan tempat tinggal juga mempengaruhi kesehatan rumah tangga yang tinggal didalamnya. Ketersediaan air bersih terutama untuk fasilitas air minum dan fasilitas jamban yang dimiliki rumah tangga bisa dijadikan indikator untuk menunjukkan rumah sehat.

Ketersediaan fasilitas air bersih untuk sumber air minum penduduk miskin menunjukkan nilai yang cukup baik. Pembangunan dalam bidang sanitasi yang menjadi perhatian pemerintah membuat fasilitas tersebut bisa dinikmati semua lapisan masyarakat. Persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih layak

konsumsi dan yang menggunakan jamban sendiri/bersama selama periode 2018-2020 dapat ditunjukkan pada gambar 3.2.3. Secara umum, selama kurun waktu tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air bersih layak konsumsi. Rumah tangga pengguna air layak yang dimaksud disini adalah air minum yang sumbernya dari air terlindung yaitu ledeng meteran, ledeng eceran, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung yang jarak penampungan kotoran atau limbah lebih dari 10 meter atau air minum yang sumbernya dari air terlindung namun jarak ke penampungan kotoran/limbah kurang dari 10 m atau air tidak terlindung tapi sumber untuk mandi/cuci dan lain-lain dari air terlindung. Pada periode 2019-2020 terjadi peningkatan persentase penduduk miskin yang menggunakan air bersih layak konsumsi. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan sarana dan prasarana air bersih layak konsumsi yang dinikmati oleh penduduk miskin di Kabupaten Magelang.

Gambar 3.2.3.
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Bersih Layak Konsumsi dan yang Menggunakan Jamban Sendiri/ Bersama Tahun 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Selain itu, ketersediaan jamban menjadi salah satu indikator dalam melihat baik buruknya fasilitas perumahan. Selain ketersediaan jamban, indikator penggunaan fasilitas jamban juga melihat ketersediaan jamban tersebut milik sendiri, jamban bersama, jamban umum, dan tidak tersedianya fasilitas jamban. Pada tahun 2020, persentase

rumah tangga miskin yang sudah menggunakan jamban sendiri atau bersama sebanyak 83,04 persen. Angka ini meningkat sebesar 5,89 persen poin dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 77,15 persen.

3.3. Program Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah melakukan berbagai langkah konsolidasi dalam upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Perlindungan sosial masyarakat akan pangan diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhannya.

Program raskin adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan sasaran penduduk yang miskin dan penduduk rentan miskin. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran dalam memenuhi kebutuhan pokok dalam bentuk beras.

Tabel 3.3.1
Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin, Rata-rata Banyaknya Raskin yang diterima dan Rata-rata Harga Raskin Perkg, Tahun 2016-2018

Komponen	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase Penerima Raskin (persen)	86,75	79,14	79,87
Rata-Rata Raskin yang Diterima (Kg)	5,07	4,94	4,92
Rata-rata Harga Raskin per Kg (Rp.)	2.199	2.359	1.452

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Persentase rumah tangga miskin yang pernah membeli raskin pada Bulan November 2017 sampai dengan Februari 2018 sebesar 79,87 persen, lebih tinggi dibanding rumah tangga miskin yang menerima raskin Tahun 2017 yang sebanyak 79,14 persen. Rata-rata rumah tangga miskin tersebut membeli raskin 4,92 kg perbulan dengan harga rata-rata Rp. 1.452,-. Harga ini jauh dibawah harga rata-rata tahun sebelumnya

karena menjelang pergantian rastra ke BPNT di tahun 2018 ada beberapa wilayah yang rastranya diberikan secara gratis dan penerima manfaat hanya membayar biaya transport saja. Di Tahun 2017 rumah tangga miskin yang menerima raskin/rastra sebanyak 79,14 persen dengan rata-rata berat yang diterima tiap rumah tangga adalah 4,94 kg dengan harga rata-rata Rp. 2.359,-.

Program bantuan sosial pangan sebelumnya merupakan Subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya, pada tahun 2018 program Subsidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi program Bantuan Sosial Pangan yang disalurkan melalui skema nontunai dan Bansos Rastra. Pada akhir tahun 2019, program Bantuan Sosial Pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema nontunai atau BPNT termasuk Kabupaten Magelang. BPNT merupakan upaya pemerintah untuk mentransformasikan bentuk bantuan menjadi nontunai (*cashless*) yakni melalui penggunaan kartu elektronik yang diberikan langsung kepada KPM. Bantuan sosial tersebut disalurkan kepada KPM dengan menggunakan sistem perbankan, yang kemudian dapat digunakan untuk memperoleh beras dan/atau telur di e-Warong, sehingga KPM juga memperoleh gizi yang lebih seimbang.

Pada tahun 2020 dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial dan meningkatkan efektifitas program bantuan sosial pangan, maka program BPNT dikembangkan menjadi program Sembako. Dengan program Sembako, indeks bantuan yang semula Rp.110.000/KPM/bulan naik menjadi Rp.150.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan bahan pangan yang ditentukan untuk program Sembako di e-Warong.

Selain itu, program Sembako memperluas jenis komoditas yang dapat dibeli sehingga tidak hanya berupa beras dan telur seperti pada program BPNT. Bahan pangan yang dapat dibeli oleh KPM di e-Warong menggunakan dana bantuan program Sembako adalah: 1) Sumber karbohidrat: beras atau bahan pangan lokal seperti jagung pipilan dan sagu, 2) Sumber protein hewani: telur, daging sapi, ayam, ikan, 3) Sumber protein nabati: kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu., dan 4) Sumber vitamin dan mineral: sayur-mayur, buah-buahan. Pemilihan komoditas bahan pangan dalam program Sembako bertujuan untuk menjaga kecukupan gizi KPM.

Pada tahun 2019, penduduk miskin yang mendapatkan bantuan BPNT sebanyak 30,03 persen dengan rata-rata beras yang diterima sebanyak 8,46 kg. Selain itu, program senilai Rp.110.000/KPM/bulan juga dibelikan telur 1 kg/sekitar 16 butir. Pada tahun 2020, terjadi peningkatan persentase Penerima BPNT dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu sebesar 45,52 persen atau meningkat sebanyak 15,49 persen poin. Selain itu, rata-rata beras yang diterima oleh KPM juga meningkat dari 8,46 kg menjadi 9,71 kg di tahun 2020.

Tabel 3.3.2
Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima BPNT dan Rata-rata Banyaknya Bantuan yang diterima, 2019-2020

Komponen	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)
Persentase Penerima BPNT (persen)	30,03	45,52
Rata-Rata Beras yang Diterima (Kg)	8,46	9,71

Pembangunan kesehatan adalah sebagai bagian dari pembangunan nasional, dalam pembangunan kesehatan tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kenyataan yang terjadi sampai saat ini derajat kesehatan masyarakat masih rendah khususnya masyarakat miskin.

Program pemerintah dalam bidang kesehatan adalah Program Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Program ini terdiri dari PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan UU SJSN yang iurannya dibayari Pemerintah sebagai peserta program Jaminan Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah. Sedangkan

peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari: 1) Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, 2) Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya, 3) Buka pekerja dan anggota keluarganya.

Selain program dari pemerintah pusat, ada juga jaminan kesehatan yang berasal dari perusahaan untuk penduduk yang bekerja di perusahaan bersangkutan. Sedangkan pemerintah daerah juga menyelenggarakan jaminan kesehatan tambahan untuk masyarakat miskin yang belum masuk dalam jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin program dari pemerintah pusat dalam bentuk Jamkesda. Dengan berbagai program jaminan kesehatan ini diharapkan dapat mengurangi beban penduduk miskin dalam meningkatkan kualitas hidupnya sehingga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya bisa menjadi jalan pengentasan kemiskinan.

Tabel 3.3.3
Persentase Penduduk Miskin Menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki,
Tahun 2018-2020

Komponen	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Jamkesmas/PBI/BPJS Kesehatan	49,5	39,2	56,02
Jamkesda	1,9	5,27	0
BPJS Kesehatan	0,4	1,72	5,67
Jaminan Kesehatan Lainnya	0,0	2,0	0
Tanpa Jaminan Kesehatan	48,2	52,1	38,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Dari data Susenas Tahun 2020, lebih dari setengah penduduk miskin sudah mempunyai jaminan kesehatan berupa Jamkesmas atau BPJS Kesehatan PBI. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 39,2 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk memberikan bantuan kesehatan penduduk miskin. Akan tetapi, masih ada sebanyak 38,31 persen penduduk miskin belum memiliki Jaminan Kesehatan.

Program penanggulangan kemiskinan yang lainnya adalah disediakannya kredit yang bisa diakses oleh penduduk, baik penduduk miskin maupun penduduk tidak miskin. Kredit ini berupa kredit usaha maupun kredit konsumsi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Ada beberapa program kredit usaha yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun usaha perbankan, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Bersama (KUBE), dan Kredit Usaha Bank Selain KUR.

Tabel 3.3.4
Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kredit Usaha yang Diterima Setahun Terakhir, Tahun 2018-2020

Kredit Usaha	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
Kredit Usaha Rakyat (KUR)	4,2	5,61	2,77
Program Bank selain KUR	0,0	2,46	4,44
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	0	0	3,01
Program Koperasi	7,3	8,18	4,31
Perorangan dan Lainnya	17,9	8,92	16,85

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

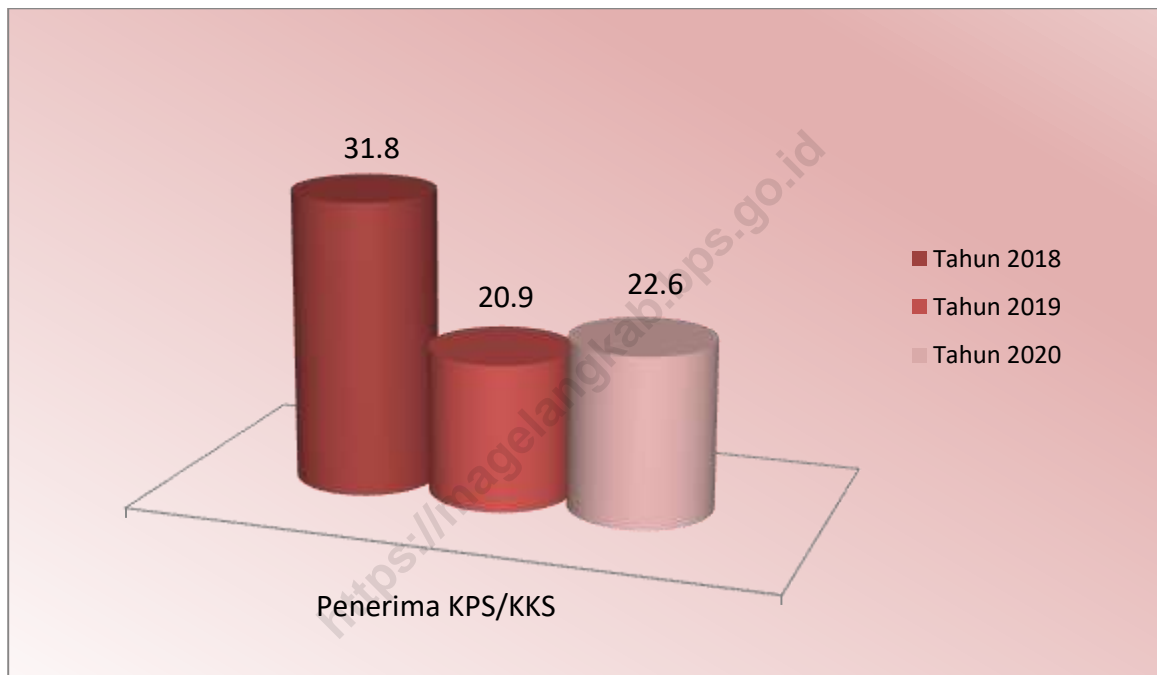
Catatan : *) mencakup semua kredit baik untuk usaha maupun konsumsi

Pada Tahun 2020, Rumah tangga miskin yang mempunyai kredit atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak 2,77 persen, Program Bank selain KUR sebesar 4,44 persen, Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebesar 3,01 persen, program koperasi sebanyak 4,13 persen, dan pinjaman perorangan dan lainnya seperti leasing, BUMDES, pegadaian sebanyak 16,85 persen. Kemudahan bagi semua lapisan penduduk untuk memperoleh pinjaman diharapkan bisa digunakan untuk kegiatan usaha yang akan meningkatkan taraf hidup penduduk.

Kartu Keluarga Sejahtera adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah untuk keluarga miskin. Sebelumnya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ini bernama Kartu Pelindung Sosial (KPS). Sebelumnya KPS bentuknya adalah tunai, sedangkan KKS sudah berbentuk nontunai. Kartu Keluarga Sejahtera ini digunakan untuk menerima bantuan dari pemerintah, salah satunya adalah Bantuan Sosial Tunai (BST) sebesar 500 ribu rupiah.

Persentase rumah tangga miskin yang menerima kartu perlindungan sosial (KPS) atau kartu keluarga sejahtera (KKS) periode 2018-2020 dapat dilihat pada gambar 3.3.1. Berdasarkan hasil pendataan Susenas tahun 2020, rumah tangga miskin yang mendapatkan KKS sebanyak 22,6 persen. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Gambar 3.3.1
Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Kartu Pelindungan Sosial (KPS) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Tahun 2018-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

BAB 4

POLA KONSUMSI PENDUDUK

4.1. Rata-rata Pengeluaran Penduduk

Keadaan ekonomi rumah tangga di suatu daerah dapat diamati dari besar kecilnya tingkat pendapatan rumah tangga, atau dapat dikatakan juga bahwa tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari tingkat pendapatan per kapita. Namun demikian untuk memperoleh data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, maka pendekatan yang sering digunakan adalah pendekatan konsumsi rumah tangga.

Dalam ilmu ekonomi, pengertian konsumsi lebih luas dari pada pengertian konsumsi dalam percakapan sehari-hari. Dalam percakapan sehari-hari konsumsi hanya dimaksudkan sebagai hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Dalam ilmu ekonomi, semua barang dan jasa yang digunakan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya disebut pengeluaran konsumsi. Dikonsumsi artinya digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas, baik dalam jumlah maupun jenisnya. Untuk memperoleh berbagai kebutuhan tersebut seseorang memerlukan pengeluaran untuk konsumsi. Dari semua pengeluaran yang dilakukan tersebut sekurang-kurangnya dapat memenuhi tingkat kebutuhan minimum yang diperlukan.

Kebiasaan makan seseorang dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi merupakan pengaruh faktor fisiologis, psikologi, dan sosial budaya. Namun ada pengaruh lain yang merubah pola makan, seperti pada saat ini terjadi pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat banyak beraktivitas dari rumah. Pada awal pandemi bulan Maret 2020, pemerintah menganjurkan agar bekerja, belajar, dan beribadah di rumah sehingga mendorong masyarakat melakukan pembelian makanan mencegah Covid-19 dan kebutuhan pokok lainnya sebagai stock persediaan untuk beberapa waktu mendatang, sehingga mengakibatkan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok tersebut. Pandemi ini berdampak pada pendapatan rumah tangga menurun dan konsumsi makanan meningkat.

Tabel 4.1 menyajikan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan konsumsi makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2016-2020. Secara umum, rata-

rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan dan non makanan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya konsumsi penduduk yang dipengaruhi oleh kuantitas konsumsi dan inflasi. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pengeluaran perkapita sebulan meningkat hampir tiga ratus ribu rupiah dari Rp.619 126,- di tahun 2016 menjadi Rp 911 250,- di tahun 2020 . Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan pada kelompok makanan pada tahun 2016 sebesar Rp. 294 828,- dalam lima tahun terakhir meningkat hampir mencapai seratus empat puluh ribu rupiah, yaitu menjadi Rp. 433 844,- pada tahun 2020. Sedangkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan pada kelompok non makanan tahun 2016 sebesar Rp. 324 298,- dalam lima tahun terakhir meningkat lebih dari seratus lima puluh ribu rupiah yaitu menjadi Rp. 477 407,- pada tahun 2020.

Tabel 4.1.
Rata-rata Pengeluaran perkapita Sebulan, Tahun 2016-2020

Tahun	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp)	Pengeluaran	
		Makanan	Non Makanan
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	911 250	433 844	477 407
2019	887 835	409 228	478 607
2018	799 654	394 239	405 415
2017	653 538	323 814	329 724
2016	619 126	294 828	324 298

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

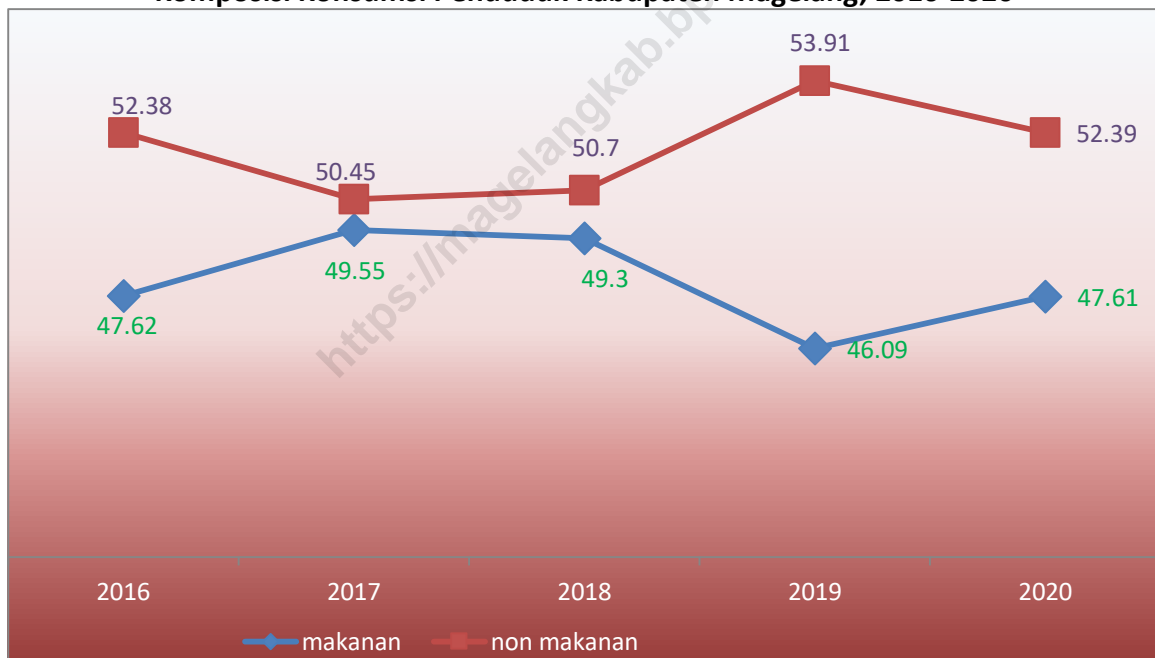
4.2. Pola Konsumsi Penduduk

Pola konsumsi penduduk merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk. Rata-rata pengeluaran penduduk didapat dengan membagi jumlah seluruh pengeluaran penduduk baik makanan, pendidikan, kesehatan, perumahan dan lain-lainnya dengan jumlah anggota rumah tangga keseluruhan. Rata-rata pengeluaran

penduduk dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari penduduk yang bersangkutan.

Komposisi pengeluaran penduduk dapat dijadikan salah satu ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Seiring dengan kenaikan pendapatan, persentase untuk pengeluaran makanan akan berkurang, tergantung oleh pemenuhan kebutuhan barang-barang mewah. Semakin kecil persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan merupakan indikasi tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dan bukan makanan berkaitan erat dengan tingkat pendapatan masyarakat. Di banyak wilayah yang sedang berkembang, pemenuhan kebutuhan makanan masih menjadi prioritas utama, karena untuk memenuhi kebutuhan energi.

Gambar 4.1
Komposisi Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang, 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Gambaran perkembangan pola konsumsi rumah tangga Kabupaten Magelang Tahun 2016 – 2020 tersaji dalam Gambar 4.1. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, konsumsi non makanan selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan konsumsi makanan dengan nilai yang berfluktuasi setiap tahunnya. Komposisi pengeluaran makanan pada tahun 2020 sebesar 47,61 persen, mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun 2019 sebesar 46,09 persen. Sementara pengeluaran untuk Non Makanan mengalami

penurunan dalam satu tahun terakhir dari 53,91 persen di tahun 2019 menjadi 52,39 persen di tahun 2020. Kondisi ini menjelaskan terjadi pergeseran pola konsumsi penduduk miskin untuk mengurangi konsumsi dari non makanan ke kebutuhan makanan yang di akibatkan pada pandemic covid 19.

Tabel 4.2.
Rata-rata pengeluaran Per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Komoditas (Rp.),
Tahun 2020

Jenis Pengeluaran			
Makanan		Non Makanan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-Padian	49 648	Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	185 962
Umbi-Umbian	4 236	Aneka barang dan Jasa	130 142
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	15 923	Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	33 747
Daging	18 644	Barang Tahan Lama	81 028
Telur dan Susu	31 861	Pajak, Pungutan dan Asuransi	34 433
Sayur-Sayuran	35 263	Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri	12 095
Kacang-Kacangan	11 475		
Buah-Buahan	23 387		
Minyak dan Kelapa	12 697		
Bahan Minuman	18 863		
Bumbu-Bumbuan	8 029		
Konsumsi Lainnya	8 386		
Makanan dan Minuman Jadi	146 918		
Rokok dan tembakau	48 515		
Total Makanan	433 844	Total Non Makanan	477 407

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

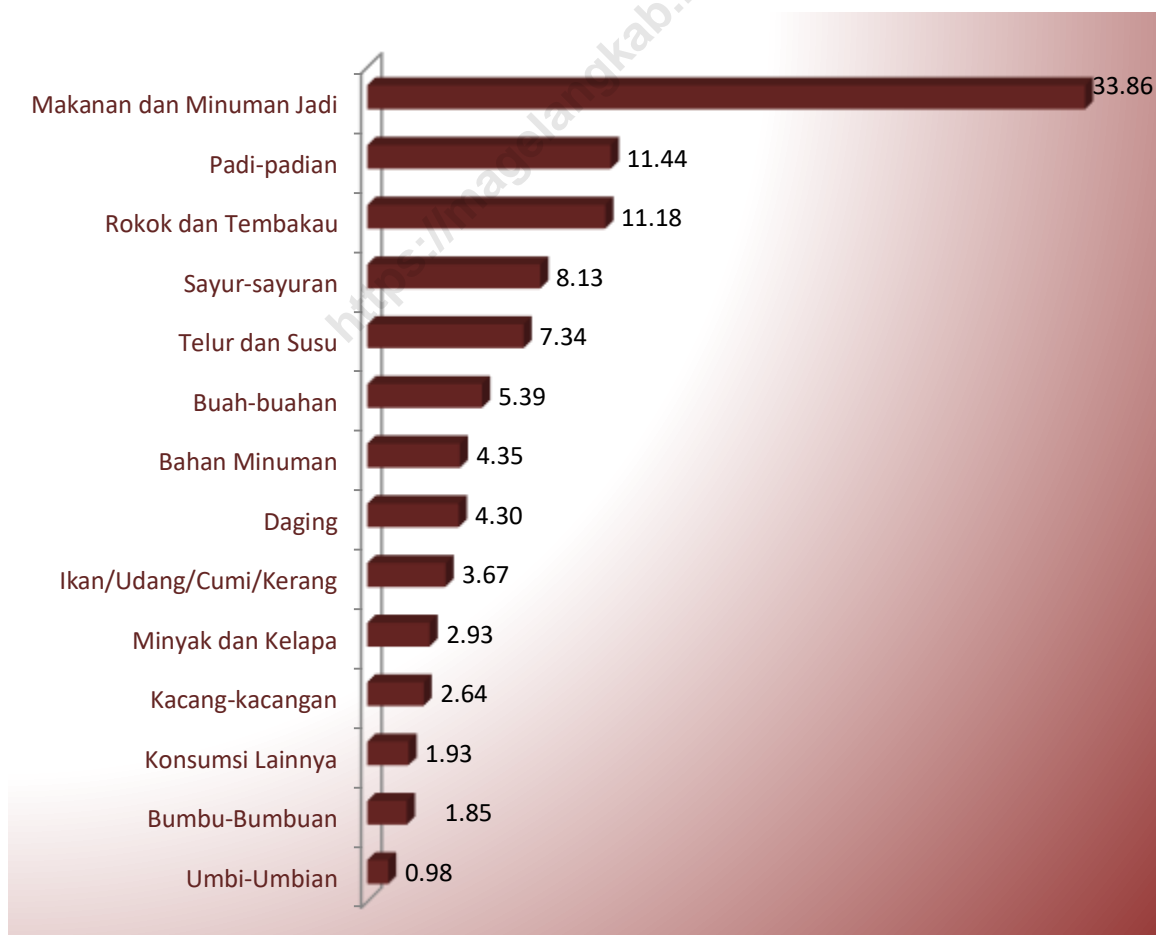
4.2.1 Pola Konsumsi Makanan

Pengeluaran kelompok makanan meliputi pengeluaran untuk bahan makanan yang berupa padi-padian, umbi, ikan, daging, telur, susu, sayuran, buah-buahan, dan lainnya, pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi, dan pengeluaran untuk rokok dan tembakau. Rata-rata pengeluaran masing-masing kelompok komoditas makanan per

kapita sebulan dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran seluruh komoditas makanan didapatkan persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan.

Pola konsumsi makanan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok makanan pada Gambar 4.2.1 terlihat bahwa 5 kelompok komoditas makanan yang tertinggi adalah makanan dan minuman jadi (33,86 persen), padi-padian (11,44 persen), rokok dan tembakau (11,18 persen), sayur-sayuran (8,13 persen), dan telur dan susu (7,34 persen). Sedangkan kelompok komoditas lainnya sebesar 28,05 persen yang terdiri dari buah-buahan (5,39 persen), bahan minuman (4,35 persen), daging (4,30 persen), ikan/udang/cumi/kerang (3,67 persen), minyak dan kelapa (2,93 persen), kacang-kacangan (2,64 persen), konsumsi lainnya (1,93 persen), bumbu-bumbuan (1,85 persen), dan umbi-umbian (0,98 persen).

Gambar 4.2.1
Pola Konsumsi Makanan Menurut Kelompok Komoditas, Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

4.2.2 Pola Konsumsi Non Makanan

Pengeluaran untuk konsumsi non makanan terdiri dari pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, aneka barang dan jasa termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk pakaian dan perlengkapannya, pengeluaran untuk barang tahan lama, pengeluaran untuk pajak, pungutan dan asuransi, dan pengeluaran untuk keperluan pesta.

Gambar 4.2.2
Pola Konsumsi Non Makanan Menurut Kelompok Komoditas, Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pengeluaran untuk konsumsi non makanan penduduk Kabupaten Magelang sebesar 52,39 persen dari total pengeluaran. Pengeluaran untuk konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan pengeluaran terbesar, yaitu 38,95 persen dari total konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsi perumahan dan fasilitas rumah tangga meliputi pengeluaran untuk perkiraan sewa rumah yang ditempati, atau nilai sewa/kontrak rumah yang ditempati beserta perbaikannya dan biaya untuk fasilitas listrik dan air, biaya konsumsi bahan bakar kendaraan dan perawatannya, biaya untuk bahan

bakar memasak, perawatan rumah, dan konsumsi untuk komunikasi. Pengeluaran terbanyak kedua adalah untuk konsumsi aneka barang dan jasa sebesar 27,26 persen. Kelompok ini mencakup kebutuhan pribadi untuk perawatan tubuh dan pakaian, biaya kesehatan, biaya pendidikan, transportasi, rekreasi dan jasa lainnya. Sedangkan konsumsi barang tahan lama yang mencakup pembelian atau penambahan barang tahan lama, termasuk alat elektronik, peralatan rumah tangga seperti mebel, sapu, barang pecah belah, dll menempati posisi ketiga sebesar 16,97 persen. Sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan pajak, pungutan, dan asuransi (7,21 persen), pakaian, alas kaki, dan tutup kepala (7,07 persen), dan keperluan pesta dan upacara/kenduri (2,53 persen).

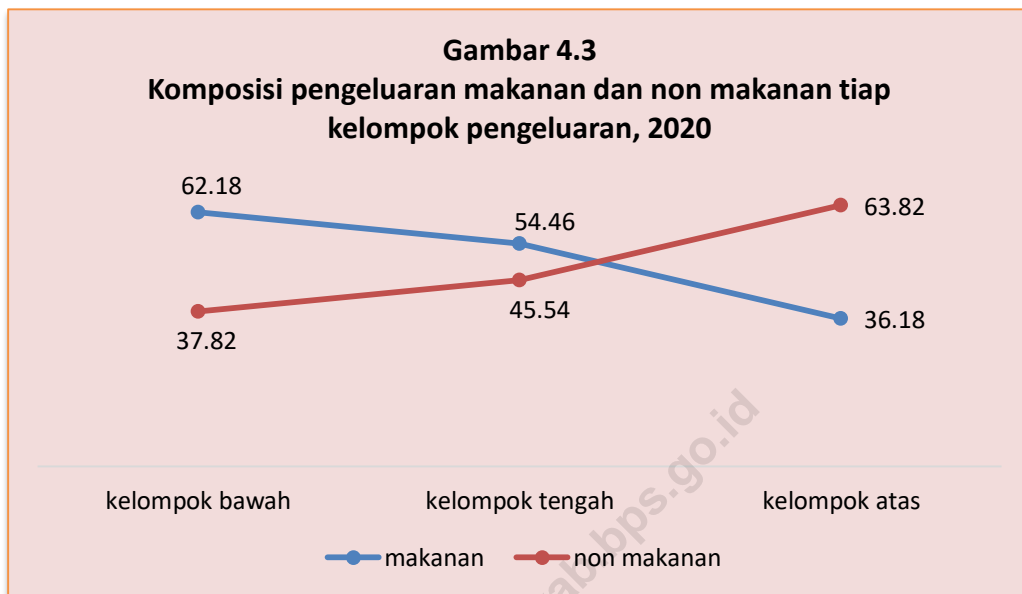
4.3 Pola Konsumsi Penduduk Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

Pengelompokan penduduk berdasarkan pengeluaran dilakukan untuk melihat pemerataan pendapatan atau ketimpangan pendapatan penduduk di suatu wilayah. Ketimpangan yang terjadi di masyarakat tentu perlu menjadi bahan evaluasi belum meratanya hasil pendapatan di antara kelompok-kelompok penduduk. Bank Dunia membagi penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu 40 persen penduduk dengan kelompok pengeluaran terendah, 40 persen penduduk dengan kelompok pengeluaran tengah, dan 20 persen penduduk dengan kelompok pengeluaran tertinggi.

Kelompok penduduk dengan pengeluaran terbesar mempunyai rata-rata pengeluaran sebesar Rp. 2 057 711,-, nilai ini 2,5 kali lipat dibandingkan rata-rata pengeluaran kelompok penduduk tengah yang sebesar Rp. 822 526,-, dan lebih dari 5 kali lipat dibanding rata-rata pengeluaran penduduk kelompok bawah yang sebesar Rp. 423 932,-. Perbedaan yang besar dalam rata-rata pengeluaran penduduk tiap bulan memperlihatkan kesenjangan pengeluaran yang cukup tinggi. Perbedaan tersebut juga mempengaruhi komposisi konsumsi tiap kelompok pengeluaran. Penduduk dengan kelompok pengeluaran yang tinggi, menunjukkan tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dibanding kelompok di bawahnya. Hal ini juga akan mempengaruhi pola konsumsi tiap kelompok.

Pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa penduduk di kelompok pengeluaran terendah masih mengalokasikan sebagian besar pengeluarannya untuk konsumsi makanan, yaitu sebesar 62,18 persen. Sedangkan untuk kelompok tengah, komposisi pengeluaran makanan sudah lebih kecil tetapi masih dominan yaitu sebesar 54,46 persen.

Sedangkan kelompok penduduk teratas konsumsi untuk makanannya paling kecil yaitu sebanyak 36,18 persen. Hal ini mendukung teori semakin membaiknya tingkat perekonomian penduduk, proporsi konsumsi untuk kebutuhan non makanan akan semakin tinggi.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Pola konsumsi makanan di setiap kelompok pengeluaran juga menunjukkan komposisi yang berbeda. Pengeluaran untuk konsumsi makanan jadi menunjukkan nilai yang paling besar, yaitu sebesar Rp. 84 937,- (32,22 persen) untuk kelompok pengeluaran bawah, sebesar Rp. 155 241,- (32,48 persen) untuk kelompok tengah, dan sebesar Rp. 253 633,- (34,07 persen) untuk kelompok atas. Meskipun urutan pengeluaran terbesarnya sama, yaitu makanan dan minuman jadi, namun pola konsumsi pengeluaran makanan untuk setiap kelompok berbeda. Untuk kelompok bawah dan kelompok tengah, konsumsi tertinggi setelah makanan dan minuman jadi adalah padi-padian, sayur, telur dan susu, serta bahan minuman. Sedangkan untuk kelompok atas, konsumsi tertinggi setelah makanan dan minuman jadi adalah telur dan susu, buah-buahan, padi-padian, dan daging.

Pengeluaran non makanan juga mempunyai pola yang hampir sama di ketiga kelompok pengeluaran. Pengeluaran terbesar adalah untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, kemudian disusul dengan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa. Perbedaan yang cukup mencolok ada di pengeluaran untuk barang tahan lama,

dimana untuk 20 persen kelompok pengeluaran teratas rata-rata konsumsinya mencapai 24,17 persen sedangkan kelompok lainnya hanya sebesar 4,89 persen dan 9,48 persen.

Tabel 4.3
Rata-rata pengeluaran per Kapita Per Bulan Menurut Kelompok Komoditas dan Kelompok Pengeluaran (Rupiah), 2020

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-Padian	47 120	50 557	52 862
Umbi-Umbian	2 787	4 549	6 496
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	7 385	13 676	37 390
Daging	7 170	17 553	43 647
Telur dan Susu	15 446	30 406	67 423
Sayur-Sayuran	24 835	39 322	47 915
Kacang-Kacangan	9 855	12 022	13 609
Buah-Buahan	6 328	19 339	65 400
Minyak dan Kelapa	9 981	13 479	16 540
Bahan Minuman	13 152	20 235	27 489
Bumbu-Bumbuan	5 580	8 496	11 969
Konsumsi Lainnya	5 665	9 182	12 210
Makanan dan Minuman Jadi	84 937	155 241	253 633
Rokok	23 362	53 857	87 907
Jumlah Makanan	263 603	477 912	744 490
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	81 612	173 832	417 756
Aneka barang dan Jasa	41 073	103 172	361 128
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	11 984	28 848	86 814
Barang Tahan Lama	7 848	35 520	317 373
Pajak, Pungutan dan Asuransi	16 370	28 343	82 516
Keperluan Pesta dan Upacara/ Kenduri	1 443	4 900	47 636
Jumlah Non Makanan	160 329	374 614	1 313 222
Jumlah	423 932	822 526	2 057 711

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

4.4 Pola Konsumsi Kalori Penduduk

Kalori adalah satuan kandungan panas atau energy yang terdapat dalam makanan yang dibutuhkan tubuh agar dapat beraktifitas dan menjalankan fungsinya

dengan baik. Semua bahan makanan mempunyai nilai kalori yang berbeda-beda berdasarkan jenisnya. Kebutuhan kalori masing-masing orang berbeda berdasarkan tingkat aktifitasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019, tentang Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, rata-rata angka kecukupan energi bagi masyarakat Indonesia sebesar 2 100 kkal per orang per hari.

Pada tahun 2020, rata-rata konsumsi kalori penduduk Kabupaten Magelang kelompok penduduk dengan pengeluaran bawah sebesar 1 693,34 kkal, kelompok pengeluaran tengah sebesar 2 073,82 kkal, dan kelompok pengeluaran atas sebesar 2 247,46 kkal. Hal tersebut menunjukkan bahwa hanya kelompok pengeluaran atas yang memenuhi rata-rata angka kecukupan energi sedangkan dua kelompok lainnya yaitu kelompok tengah dan kelompok bawah belum memenuhi angka kecukupan energi.

Tabel 4.4
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita per Hari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran Penduduk (kkal), 2020

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-Padian	699,95	711,07	617,86
Umbi-Umbian	35,06	31,73	32,54
Ikan/Undang/Cumi/Kerang	14,07	21,19	35,62
Daging	24,33	59,92	101,19
Telur dan Susu	33,55	59,31	107,58
Sayur-Sayuran	41,68	46,68	46,57
Kacang-Kacangan	51,35	55,97	58,54
Buah-Buahan	25,98	42,05	68,12
Minyak dan Kelapa	213,80	279,03	311,96
Bahan Minuman	107,93	128,02	130,31
Bumbu-Bumbuan	4,84	7,17	8,09
Konsumsi Lainnya	34,76	51,37	60,93
Makanan dan Minuman Jadi	406,05	580,32	668,16
Rokok	0,00	0,00	0,00
Jumlah	1 693,34	2 073,82	2 247,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

Penyumbang kalori terbesar di tiap kelompok pengeluaran makanan berbeda di tiap kelompoknya. Untuk kelompok pengeluaran terbawah dan kelompok tengah, kalori terbanyak diperoleh dari konsumsi padi-padian yang sebesar 699,95 kkal dan 711,07 kkal. Untuk kelompok pengeluaran atas, kalori terbesar diperoleh dari makanan dan minuman jadi sebesar 668,16 kkal.

4.5 Pola Konsumsi Protein Penduduk

Protein merupakan salah satu nutrisi yang penting dan sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Di dalam tubuh, protein dipecah menjadi asam amino yang dibutuhkan tubuh untuk menghasilkan enzim, hormon, *neurotransmitter* (senyawa kimia dalam otak), dan antibodi. Tanpa asupan yang memadai tubuh manusia tidak dapat berfungsi dengan baik. Kandungan protein ada dalam tiap jenis makanan, meskipun besarnya persentase kandungan dalam tiap makanan/bahan makanan berbeda-beda. Kandungan protein yang tinggi terdapat dalam ikan dan biota laut lainnya, daging, telur, susu, dan kacang-kacangan. Sedangkan bahan pangan lainnya mempunyai kandungan protein yang lebih rendah.

Berdasarkan PMK Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia, rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia sebesar 57 (lima puluh tujuh) gram per orang per hari. Berdasarkan hasil SUSENAS Maret 2020, rata-rata konsumsi protein perkapita per hari penduduk Kabupaten Magelang adalah 45,38 gram untuk penduduk kelompok pengeluaran 40 persen terbawah, 57,91 gram untuk kelompok pengeluaran tengah, dan 69,56 gram untuk kelompok pengeluaran teratas. Dari hasil tersebut dapat dilihat jika asupan protein ideal penduduk Kabupaten Magelang terpenuhi di kelompok pengeluaran tengah dan kelompok atas.

Perlu menjadi perhatian pemerintah bahwa kelompok pengeluaran 40 persen terbawah masih jauh di di bawah rata-rata angka kecukupan energi dan protein. AKG adalah kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.

Pandemi COVID-19 yang masih berlangsung di Indonesia mempersulit rumah tangga untuk mengakses pangan sehat dan bergizi yang terjangkau. Pandemi COVID-19

yang terus tereskalasi bisa berdampak pada risiko terhadap pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs) *zero hunger* tahun 2030 (Bappenas, 2020). Upaya pencegahan COVID-19 diperlukan pertahanan tubuh yang optimal, dengan mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Gizi seimbang yaitu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktifitas fisik, perilaku hidup bersih dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi

Tabel 4.5
Rata-rata Konsumsi Protein Per Kapita Sehari menurut Kelompok Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (gram), 2020

Kelompok Komoditas	Kelompok Pengeluaran		
	40 persen terbawah	40 persen tengah	20 persen teratas
(1)	(2)	(3)	(4)
Padi-Padian	16,56	16,84	14,62
Umbi-Umbian	0,33	0,35	0,40
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	2,20	3,23	5,53
Daging	1,61	3,81	6,67
Telur dan Susu	1,83	3,36	5,75
Sayur-Sayuran	2,71	2,91	2,91
Kacang-Kacangan	5,33	5,68	5,84
Buah-Buahan	0,25	0,42	0,79
Minyak dan Kelapa	0,20	0,29	0,27
Bahan Minuman	1,05	1,12	1,13
Bumbu-Bumbuan	0,19	0,28	0,33
Konsumsi Lainnya	0,60	0,92	1,07
Makanan dan Minuman Jadi	12,53	18,71	24,26
Rokok	0,00	0,00	0,00
Jumlah	45,38	57,91	69,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang

BAB V

P E N U T U P

Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu aspek penting guna mendukung strategi pengentasan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran dan profil kemiskinan yang tepat merupakan instrumen tangguh bagi pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, di samping data seberapa besar jumlah dan persentase penduduk miskin, maka diperlukan pula untuk diketahui bagaimana kondisi kehidupan mereka melalui data karakteristik penduduk miskin.

Publikasi “Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang Tahun 2020” memberi kesimpulan tentang perkembangan tingkat kemiskinan dan pola pengeluaran konsumsi penduduk Kabupaten Magelang, yaitu :

1. Jumlah dan persentase penduduk miskin tahun 2020 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 0,60 persen poin atau sebanyak 8,89 ribu jiwa. Salah satu faktor penyebab meningkatnya angka kemiskinan di tahun 2020 ini adalah adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk.
2. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan yang artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan sehingga berdampak pada semakin sulitnya penduduk miskin untuk keluar dari kemiskinan. Begitu pula dengan peningkatan indeks keparahan kemiskinan yang berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin tinggi.
3. Pelaksanaan bantuan program penanggulangan kemiskinan masih ada yang belum tepat sasaran. Hal ini ditandai dengan beberapa program bantuan pengentasan kemiskinan yang tidak dinikmati oleh penduduk miskin.
4. Persentase pengeluaran konsumsi untuk pengeluaran makanan lebih kecil dibanding pengeluaran untuk konsumsi non makanannya akan tetapi terjadi peningkatan pada

konsumsi pengeluaran makanan. Pola naiknya pengeluaran untuk makanan mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun.

5. Pengeluaran untuk konsumsi makanan didominasi oleh konsumsi makanan jadi, padi-padian dan rokok/tembakau sedangkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan didominasi oleh pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga, pengeluaran untuk kebutuhan aneka barang dan jasa, dan pengeluaran untuk barang tahan lama.
6. Pola konsumsi penduduk berdasarkan kelompok pengeluaran menunjukkan selisih rata-rata pengeluaran yang sangat jauh dari tiap kelompoknya. Kelompok penduduk dengan pengeluaran atas mempunyai rata-rata pengeluaran 2,5 kali lipat dibandingkan rata-rata pengeluaran kelompok tengah, dan lebih dari 5 kali lipat dibanding rata-rata pengeluaran kelompok bawah.
7. Komposisi pengeluaran makanan kelompok pengeluaran bawah lebih besar dibanding pengeluaran non makanan sedangkan di kelompok pengeluaran atas, komposisi pengeluaran non makanan yang mempunyai komposisi jauh lebih tinggi.
8. Hanya kelompok pengeluaran atas yang memenuhi rata-rata angka kecukupan energi sebesar 2 100 kkal per orang per hari sedangkan dua kelompok lainnya yaitu kelompok tengah dan kelompok bawah belum memenuhi rata-rata angka kecukupan energi.
9. Asupan protein sebesar 57 gram per orang per hari di Kabupaten Magelang terpenuhi di kelompok pengeluaran tengah dan kelompok atas.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MAGELANG**

Jl. Soekarno - Hatta No.4 Kota Mungkid 56511
Telp./Fax.(0293) 788143. E-Mail : bps3308@bps.go.id
Homepage: <http://magelangkab.bps.go.id/>

